

ANALISIS PROFESIONALISME PRAJURIT TNI ANGKATAN LAUT DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA DI KOMANDO ARMADA I

PROFESIONALISM ANALYSIS OF INDONESIAN NAVY IN SUPPORTING NATIONAL DEFENSE AT 1ST FLEET COMMAND

Gabriella Inri Fidelia Kasenda¹, S. Pantja Djati², Suprpto³

UNIVERSITAS PERTAHANAN

(gifkasenda@gmail.com, spantjadjati@yahoo.co.id, prAPT055@gmail.com)

Abstrak – Seiring dengan berkembangnya teknologi, semua negara dituntut untuk menghadapi kebutuhan akan organisasi pertahanan yang profesional. Setiap negara memiliki satuan dan organisasi pertahanannya masing-masing atau angkatan bersenjata masing-masing. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI ditempatkan sebagai komponen utama sistem pertahanan negara. Faktanya, dalam upaya pemerintah membangun sistem pertahanan negara yang ideal melalui pembangunan TNI profesional masih saja ditemukan berbagai permasalahan yang bertolak belakang dari perwujudan TNI profesional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikator profesionalisme prajurit TNI Matra Laut khususnya di Koarmada I yang meliputi keahlian, tanggung jawab dan *corporateness* prajurit dalam menjalankan perannya sebagai komponen utama pertahanan negara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan desain penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh di lapangan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif data analisis dengan tahapan meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa keahlian prajurit TNI Angkatan Laut di Komando Armada I dibentuk melalui serangkaian tahapan pendidikan, latihan dan penugasan, tanggung jawab prajurit dilaksanakan dalam fungsinya sebagai alat pertahanan negara dan *corporateness* prajurit dilaksanakan guna mengakomodir keahlian prajurit TNI Angkatan Laut sebagai insan individu yang bekerja secara terorganisir. Tugas dan fungsi TNI dalam pertahanan negara sangat penting, oleh karena itu peneliti merekomendasikan kepada para pemangku kebijakan untuk menerapkan prinsip *well paid, well trained and well educated* guna terwujudnya TNI Angkatan Laut yang profesional dalam mendukung pertahanan negara.

Kata kunci: Manajemen Pertahanan, Postur Pertahanan Negara, Profesionalisme TNI, Sumber Daya Manusia, TNI Angkatan Laut.

Abstract – As technology develops, all countries are required to face the need for professional defense organizations. Each country has its own defense units and organizations or their respective armed forces. The TNI plays the role of a state instrument in the field of defense in carrying out its duties based on state policy and political decisions. The TNI is placed as a major

¹ Program Studi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan. ²

Program Studi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan. ³

Program Studi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan.

component of the national defense system. In fact, in the efforts of the government to build an ideal national defense system through the development of professional TNI, there are still many problems that are contrary to the realization of professional TNI. This study aims to analyze the professionalism indicators of the Indonesian Navy soldiers especially at 1st Fleet Command which includes the expertise, responsibilities and corporateness of the soldiers in carrying out their role as the main component of national defense. This research is a qualitative study using phenomenological research design. Data collection techniques carried out through interviews, observation, and documentation. Data obtained in the field were then analyzed using qualitative data analysis techniques with interactive data analysis models with stages including data condensation, data presentation and drawing conclusions/verification. Based on the results of the analysis, the results show that the expertise of Navy soldiers in the 1st Fleet Command was formed through stages of education, training and assignment, the responsibility of soldiers carried out in its function as a means of national defense and corporateness of soldiers carried out in order to accommodate the expertise of Navy soldiers as individuals who worked in an organized manner. The duties and functions of the TNI in national defense are very important, therefore researchers recommend policy makers to apply the principle of well paid, well trained and well educated in order to realize a professional Navy in supporting national defense.

Keywords: Defense Management, Human Resource, Indonesian Navy, TNI Professionalism, National Defense Posture.

Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya teknologi, semua negara dituntut untuk menghadapi kebutuhan akan organisasi pertahanan yang profesional. Setiap negara memiliki satuan dan organisasi pertahanannya masing-masing atau angkatan bersenjata masing-masing. Dengan adanya angkatan bersenjata ini diharapkan dapat tersedianya perlindungan bagi negara tersebut dari penyerangan pihak lain dan dapat menjalankan pertahanan negara secara utuh. Ketika berbicara tentang angkatan bersenjata, profesionalisme merupakan kunci karena diwajibkan memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh banyak orang.

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam

menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara saat menghadapi ancaman militer dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Negara membutuhkan prajurit TNI yang profesional untuk dapat mewujudkan cita-citanya, untuk menangkal ancaman dan menjaga keamanan dari serangan negara lain atau dari para separatis. Dalam Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 7 ayat (1) menerangkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara⁴.

Tugas pokok TNI tersebut dilakukan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang dan dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ketiganya merupakan bagian dari SDM pertahanan negara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan panglima.

Sumber daya manusia harus dikelola secara optimal untuk menciptakan sumber daya manusia tentara nasional Indonesia yang unggul dan profesional.⁵ Sumber daya manusia merupakan faktor sentral yang menjadi subyek (tumpuan) bagi pengelolaan sumber daya nasional yang bertumpu pada totalitas kemampuan/profesionalisme dan kesadaran bela negara setiap warga negara untuk kepentingan pertahanan

negara. Pengembangan kemampuan SDM pertahanan negara dilaksanakan dalam rangka mengelola dan mendayagunakan seluruh sumber daya nasional untuk menghadapi setiap ancaman.

Pengembangan prajurit TNI perlu memiliki jati diri yaitu tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional. Untuk menciptakan tentara khususnya tentara yang profesional perlu pengembangan sumber daya manusia secara sistematis, terpadu dan terarah, agar dapat membentuk tentara yang memiliki profesional yang tinggi guna menjaga keutuhan dan seluruh warga negara Indonesia.

⁶Undang-undang no 34 tahun 2004 pasal 2 huruf (d) menjelaskan bahwa Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No 34 Tahun 2004 Tentang Nasional Indonesia, Pasal 7 ayat (1).

⁵ Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015, h.59-60

⁶ Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia, pasal 2 huruf (d).

Tentara nasional yang profesional sangat dibutuhkan oleh setiap sumber daya manusia tentara nasional Indonesia khususnya tentara nasional Indonesia angkatan laut (TNI AL). Tentara angkatan laut ini sebagai komponen utama dalam menjaga laut Indonesia maka dari itu perlunya tentara yang profesional.

⁷Esensi kesatuan dari profesionalisme militer adalah totalitas yang membentuk dasar dari bagaimana individu, kelompok dan militer itu sendiri bertindak untuk melaksanakan tugasnya.

Sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 pasal 9, TNI Angkatan Laut bertugas:

1. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
2. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
3. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
4. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan

⁷ David Alfredo, "Defin Military Professionalism" careertrend. Retrieved from

kekuatan matra laut; serta

5. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Tugas pokok yang diamanahkan pada TNI Angkatan Laut tersebut harus disesuaikan dengan porsinya dan kondisi perubahan yang terjadi. Dalam pelaksanaan tugas pokok yang dijalankan masih banyaknya ancaman yang terjadi. Di beberapa tahun belakangan ini masih banyak terjadi kecelakaan KRI dilaut indonesia. Berikut beberapa kecelakaan KRI yang terjadi di beberapa tahun terakhir diantaranya:

Tabel 1

2008-2012
KRI Memet Sastrawiria – 380 Korvet (Ant Kapal Selam) Terbakar di sekitar perairan Lampung pada tahun 2008. ⁸
KRI Klewang – 625 Kapal Cepat Rudal Terbakar kemudian tenggelam di Pangkalan TNI AL Banyuwangi pada tahun 2012. ⁹
2013-2014
KRI Teluk Peleng – 535 Kapal Amfibi (Kapal Angkut Tank) Mengalami kebocoran kemudian kandas di dermaga TNI AL Pondok Dayung pada

⁸<https://news.detik.com/berita/d-990483/kri-memet-sastrawiria-terbakar-di-perairan-lampung>. Diakses pada 19 Juli 2019.

⁹ <https://news.detik.com/berita/d-2046452/ini-dia-spesifikasi-kri-siluman-klewang-yang-terbakar>. Diakses pada 19 Juli 2019.

tahun 2013. ¹⁰
KRI Teluk Bintuni – 520 Kapal Amfibi (Kapal Angkut Tank) Sling serat baja penahan kapal putus di Lampung Selatan pada tahun 2014. ¹¹
2015-2016
KRI Karimata – 960 Kapal Angkut Logistik Terbakar di Pangkalan TNI AL Pondok Dayung pada tahun 2016. ¹²
KRI Pati Unus – 384 Korvet (Anti Kapal Selam) Mengalami kebocoran kemudian kandas di selat Malaka pada tahun 2016. ¹³
2017-2018
KRI Arun – 903 Kapal Tanker (Bantu Angkut Cair) Kandas di Dermaga Ujung, Surabaya pada tahun 2018. ¹⁴
KRI Rencong – 622 Kapal Cepat Rudal Terbakar dan kemudian tenggelam di perairan Sorong pada 2018. ¹⁵

¹⁰[https://www.tnial.mil.id/News/Seremoni al/tabid/79/articleType/ArticleView/articleId/16749/Default.aspx](https://www.tnial.mil.id/News/Seremoni%20al/tabid/79/articleType/ArticleView/articleId/16749/Default.aspx). Diakses pada 19 Juli 2019.

¹¹ <https://www.saibumi.com/artikel-57320-seling-penahan-kri-teluk-bintuni-putus-sebelum-diresmikan.html>. Diakses pada 19 Juli 2019.

¹² <https://www.indomiliter.com/kri-karimata-960-setelah-terbakar-hebat-kini-resmi-pensiun-dari-kolinlamil-tni-al/>, diakses pada 19 Juli 2019.

¹³<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2016053114023-20-134742/kri-pati-unus-bocor-di-perairan-belawan>. Diakses pada 19 Juli 2019.

¹⁴ <https://www.indomiliter.com/kapal-tanker-kri-arun-903-kandas-di-dermaga-ujung/>. Diakses pada 19 Juli 2019.

¹⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180911222933-20329454/kri-rencong-terbakar-dan-tenggelam-semua-awak-selamat>. Diakses pada 19 Juli 2019.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2019)

Melihat dari beberapa kecelakaan KRI yang terjadi menunjukkan adanya kurang optimalnya sumber daya daya tentara angkatan laut yang masih belum optimal dalam pengembangan *skill* dan kemampuan untuk mengatasi masalah tersebut.

Pada tahun 2008 KSAL Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno dalam sambutannya saat sertijab Danpuspomal di Mabes TNI AL, mengatakan bahwa tahun 2008 terjadi pelanggaran personel TNI AL yang mencapai 779 kasus.¹⁶ KSAL saat itu juga berpesan bahwa puspomal harus lebih proaktif untuk melihat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh personel TNI AL. Namun 10 tahun berikutnya, pada tahun 2018 juga ternyata masih terjadi beberapa pelanggaran yang dilakukan personel TNI AL seperti penyekapan warga¹⁷, penggunaan narkoba, dan tindakan asusila¹⁸.

Fenomena ini membuat peneliti tertarik meneliti tentang profesionalisme

¹⁶<https://news.detik.com/berita/d1051031/pelanggaran-personel-tni-al-mencapai-779-kasus>. Diakses pada 19 Juli 2019.

¹⁷<https://news.detik.com/berita/d-3988454/terlibat-penyekapan-warga-prajurit-tni-al-dipecat>. Diakses pada 19 Juli 2019.

¹⁸<https://nasional.kompas.com/read/2009/02/20/09312044/policy.html>. Diakses pada 19 Juli 2019.

prajurit TNI AL. Peneliti ingin menganalisis *gap* antara kebijakan dan usaha-usaha pemerintah khususnya para pejabat TNI AL untuk meningkatkan profesionalisme personelnnya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti telah melaksanakan sebuah penelitian tentang **“Analisis Profesionalisme Prajurit TNI Angkatan Laut dalam Mendukung Pertahanan Negara di Komando Armada I”** dengan tujuan untuk menganalisis keahlian, tanggung jawab dan *corporateness* prajurit TNI AL di Komando Armada I. Profesionalisme sangat diperlukan dalam mempertahankan dan mengamankan wilayah NKRI.

Dalam Ilmu pertahanan menjelaskan bahwa ilmu pertahanan adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola sumber daya dan kekuatan nasional pada saat damai, perang, dan pada saat sesudah perang, guna menghadapi ancaman dari luar dan dari dalam negeri, baik berupa ancaman militer dan non-militer terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan

segenap bangsa dalam rangka mewujudkan keamanan nasional¹⁹.

Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan organisasi.²⁰

Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang manajemen yang melaksanakan kegiatan pengadaan, pelatihan dan pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, serta pemeliharaan sumber daya manusia. Fungsi-fungsi manajemen akan menjadi dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan strategis. Manajemen sumber daya manusia merupakan proses untuk menciptakan pekerja yang dapat menghasilkan produk (barang dan jasa) yang memiliki daya saing.²¹

Faktor profesionalisme merupakan faktor yang berasal dari dalam diri prajurit yang dapat dikendalikan melalui

¹⁹ Makmur Supriyatno, Tentang Ilmu Pertahanan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h.29

²⁰ Mila Badriyah, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.15

²¹ Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Erlangga, 2012), h.31

pelatihan dan pendidikan.²² Profesional militer dapat terwujud apabila mereka tidak melakukan campur tangan di bidang politik. Profesionalisme militer membutuhkan waktu dan proses, karena profesionalisme militer bukanlah produk jadi yang bisa dengan mudah kita dapatkan secara cuma-cuma. Profesionalisme militer adalah suatu proses yang harus terus diperjuangkan.²³ Profesionalisme lebih dari hanyalah sebuah kunci dalam militer. Semua yang dilakukan harus dengan tingkat disiplin, komitmen, dan keterampilan yang ekstrem. Hal-hal seperti itu adalah inti dari profesionalisme militer. Tidak mungkin ada keterampilan tanpa adanya kedisiplinan untuk berlatih, kemudian tidak mungkin ada kepatuhan pada kedisiplinan tanpa adanya komitmen untuk bertahan kemudian tidak mungkin juga ada komitmen tanpa keterampilan yang disiplin untuk menyelesaikan misi.

Ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam militer yang

profesional, yakni keahlian (*expertise*), tanggung jawab (*responsibility*) dan *corporateness*.²⁴

Keahlian berarti kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam pekerjaan. Keahlian adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang²⁵. Keahlian merupakan sesuatu minat atau bakat yang harus dimiliki oleh seseorang, dengan keahlian yang dimilikinya memungkinkan untuk dapat menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugas secara baik dengan hasil yang maksimal. Keahlian yang dimiliki seseorang dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal yang nantinya harus terus menerus ditingkatkan. Salah satu sumber peningkatan keahlian dapat berasal dari pengalaman-pengalaman dalam bidang tertentu. Pengalaman tersebut dapat diperoleh melalui proses yang bertahap, seperti pelaksanaan tugas-tugas, pelatihan ataupun kegiatan lainnya yang

²² I.G. Merta Yasa. (2013). "Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Profesionalisme Terhadap Kinerja Prajurit TNI AL di Lanal Palembang". Jurnal Mahasiswa Magister Manajemen. *EJME*. Vol. 1, No.3.

²³ David Alfredo "Define Military Professionalism" careertrend. Retrieved from <https://careertrend.com/about-5476748-define-military-professionalism.html>, diakses pada 26 September 2019.

²⁴ Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State; the Theory and Politics of Civil- Military Relations*. (Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1957)

²⁵ Robbins, Stephen P, dan Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi Organizational Behavior*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 57.

berkaitan dengan pengembangan keahlian seseorang.²⁶

Untuk Indikator dari keahlian adalah sebagai berikut:

1. Keterampilan Teknis (*Technical skill*)
2. Keterampilan manusia (*Human skill*)
3. Keterampilan konsep (*Conceptual skill*)

Tanggung jawab seorang profesional dalam arti luas bahwa profesional militer adalah tanggung jawabnya perlindungan terhadap masyarakat dan negara. Client dari para profesional adalah masyarakat, untuk militer tanggung jawabnya adalah melindungi masyarakat. Jenis-jenis tanggung jawab adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap kehidupan sosial dan tanggung jawab kepada Tuhan²⁷.

Corporateness adalah kesadaran dan loyalitas anggota militer bahwa mereka adalah anggota dari suatu kelompok. Kunci dari profesi militer adalah kontrol dan keterampilan. Secara organisatoris

kontrol terhadap profesionalisme militer yang dilakukan dalam dua tingkatan. Pertama, para kolega mengamati kerekatan (kohesi) di antara para perwira sebagai profesional dan anggota suatu kelompok sosial. Indikator *corporateness* adalah Taat Pada Peraturan, Tanggung Jawab Pada Organisasi, Mau Bekerja Sama, Hubungan Antar Pribadi dan Kesukaan Terhadap Pekerjaan²⁸.

Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.²⁹ Keamanan nasional merupakan salah satu agenda penting dari kebijakan keamanan nasional, diantaranya adalah meningkatkan keamanan institusi-institusi sosial,

²⁶ Eka Suryaningsih Wardani. (2009). "Pengaruh Kompensasi, Keahlian dan Motivasi Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Muara Tawar". *Jurnal Manajemen Universitas Gunadarma*. Vol. 41, pp. 1-11.

²⁷ Pahlevi. "Pengertian Tanggung Jawab, Manfaat dan Macam-Macam". Retrieved from <https://www.pahlevi.net/pengertian-tanggung-jawab/>, diakses pada 9 Februari 2020.

²⁸ Soegandhi, Vannecia Marchelle, Sutanto, Eddy M., dan Setiawan, Roy. (2013). "Pengaruh Kepuasan Kerja dan Loyalitas Kerja dengan Organizational Citizenship Behavior Pada Karyawan PT. Surya Timur Sakti Jatim". Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra. *Jurnal Manajemen Bisnis*. AGORA Vol. 1, No. 1.

²⁹ Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara, Bab I Pasal 1 ayat (2)

ekonomi dan politik bangsa terhadap berbagai macam ancaman yang muncul dari negara-negara merdeka lainnya termasuk membangun hubungan militer-sipil. Kebijakan keamanan nasional dirancang untuk mengurangi atau menetralkan berbagai usaha yang akan melemahkan kekuatan negara, salah satunya adalah dengan operasional militer.³⁰

Bagi negara Indonesia yang sebagian wilayah berupa perairan, Angkatan Laut memiliki peran penting, secara universal TNI Angkatan Laut memiliki tiga peran

Metode Penelitian

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan metode/pendekatan penelitian yang digunakan.

Metodologi penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti harus memenuhi unsur; rasional, empiris dan sistematis sebagai dasar ciri

keilmuan.³² Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.³³ Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, dimana pengertian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti objek alamiah.

³⁴Metode kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas atau fenomena. Penelitian kualitatif pada dasarnya memahami masalah dalam interaksi manusia. Penelitian kualitatif adalah proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Penelitian dengan pendekatan fenomenologi menggambarkan arti sebuah pengalaman hidup untuk beberapa orang tentang sebuah konsep

³⁰ Richard W. Stewart, *American Military History vol. I; The United States Army and The Forging A Nation 1775- 1791*, United States Army: Washington DC, 2009, h. 3-4.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014), h.2

³³ M. Iqbal. Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.21

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT Alfabet, 2016)

atau fenomena.³⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana adanya *gap* antara kenyataan yang terjadi di lapangan dan ekspektasi yang memunculkan dugaan awal dari sebuah fenomena yang terjadi dan dapat dimaknai melalui narasumber. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan fenomenologi, dimana yang akan diteliti adalah profesionalisme prajurit TNI Angkatan Laut dalam mendukung pertahanan negara yang diterapkan oleh Komando Armada I.

Hasil dan Pembahasan

Kriteria dasar militer profesional yang diperkenalkan Huntington, masih sangat relevan untuk menggambarkan kasus TNI yang saat ini sedang berproses menuju militer profesional.³⁶

Menurut Samuel P. Huntington militer yang profesional adalah militer yang memiliki 3 syarat/kategori, yakni militer harus memiliki keahlian, tanggung jawab, dan *esprit de corps*. Artinya, militer harus memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang ilmu-ilmu kemiliteran dan ilmu peperangan untuk melindungi negara dari ancaman. Militer harus pula

memiliki tanggung jawab untuk mengamankan semua proses penyelenggaraan negara berdasarkan pada supremasi sipil, HAM dan demokrasi. Militer juga harus memiliki jiwa korsa, pemahaman tentang kepangkatan, hirarki, dan jabatan agar supaya satu komando dan satu perintah. Dalam konteks ini, Huntington ingin menyatakan bahwa militer yang profesional adalah militer yang netral dalam politik, berada di atas semua kepentingan politik, dan komitmen terhadap fungsi pertahanan negara.

Militer yang profesional didambakan oleh semua negara karena terwujudnya tatanan politik yang demokratis sangat ditentukan oleh corak militernya yang profesional. Dalam konteks ini, apabila kita melihat profesionalisme militer di Indonesia, sebenarnya negara / pemerintah telah menggariskan definisi, ukuran, dan parameter TNI yang profesional.

Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik Negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia,

³⁵ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions*, (California: Sage Publication, 1998)

³⁶ Syamsul Ma'arif. (2014). "Prajurit Profesional-Patriot: Menuju TNI Profesional pada Era Reformasi". *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, Vol. 19, No. 2, pp. 257-286.

ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.³⁷

Oleh karena itu, untuk mengukur profesionalisme militer di Indonesia pada era reformasi saat ini seyogyanya berpegang teguh pada definisi yang tertuang dalam UU TNI tersebut, sehingga akan dapat digambarkan sejauhmana upaya yang selama ini telah dilakukan oleh Indonesia dalam mewujudkan profesionalisme TNI. Di bawah ini akan dijabarkan hasil penelitian tentang profesionalisme TNI Angkatan Laut di Koarmada I berdasarkan teori oleh Samuel P. Huntington yang menyatakan bahwa terdapat 3 indikator profesionalisme, yaitu keahlian, tanggung jawab, dan *corporateness*.

1) Keahlian

Dalam penyelenggaraan pertahanan negara matra laut, personel TNI Angkatan Laut merupakan salah satu komponen yang memiliki fungsi sebagai penindak dan penyanggah awal pada setiap ancaman yang datang dari dan lewat laut wilayah yurisdikal nasional. Untuk membentuk personel TNI Angkatan Laut yang dapat menjalankan fungsi tersebut

diperlukan suatu sistem pembinaan personel, termasuk pembinaan dalam bidang pendidikan.

Kemampuan profesionalisme prajurit dapat dicapai melalui pembinaan pendidikan secara terpadu dan berlanjut, yaitu pembinaan yang berlandaskan pada falsafah “Dwi Warna Purwa Cendekia Wusana”, yaitu selain membentuk prajurit pejuang Sapta Marga yang tangguh, juga memiliki profesionalisme matra laut yang terampil dan mahir dalam tugas serta memiliki kesamaptaan jasmani yang tinggi.

Pendidikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sehingga mampu menjalankan perannya sebagai suatu kesatuan yang terpadu atau sebagai komplemen dari prajurit TNI Angkatan Laut.

Prajurit TNI Angkatan Laut adalah personel TNI yang ditempa sebagai prajurit pejuang Sapta Marga dan memiliki profesionalisme matra laut yang terampil dan mahir dalam melaksanakan tugasnya serta memiliki kesamaptaan jasmani yang memadai. Prajurit TNI

Angkatan Laut dituntut untuk bersifat *responsive* terhadap

³⁷ Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004, tentang TNI, Bab II pasal 2 butir D

perkembangan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan dalam pembentukan TNI Angkatan Laut profesional diupayakan melalui pembekalan dan pemantapan kemampuan personel yang dapat ditempuh melalui latihan dan penugasan sebagai kelanjutan pendidikan. Tingkat keberhasilan dalam latihan dan penugasan dapat menjadi umpan balik yang sangat berguna bagi pengembangan pendidikan. Dengan demikian keberhasilan penyelenggaraan pendidikan akan berpengaruh terhadap keberhasilan pembinaan personel TNI Angkatan Laut secara keseluruhan. Mengingat penyelenggaraan pendidikan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembinaan prajurit sebagai proses investasi sumber daya manusia pertahanan. Sehingga upaya pendidikan di lingkungan TNI Angkatan Laut harus senantiasa mengarah kepada terwujudnya keseimbangan antara jiwa juang dengan profesi keprajuritan.

2) Tanggung Jawab

TNI memiliki tugas pokok yang diatur dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 yaitu menegakkan kedaulatan negara,

mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan. Sebagai komponen utama pertahanan di wilayah laut Indonesia, TNI AL juga menjalankan tugas pokok TNI tersebut. Selain itu, TNI memiliki tugas pokok lainnya yang dikenal dengan istilah Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Tugas OMSP yaitu mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*),

serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Prajurit TNI Angkatan Laut di Koarmada I sebagai komponen utama pertahanan negara selain melaksanakan tugas utama seperti yang telah diatur dalam oleh Undang-Undang TNI, personel TNI Angkatan Laut juga melaksanakan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam pelaksanaan OMSP terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan, diantaranya adalah: kejelasan sasaran, kesatuan tindak, keabsahan, keuletan, batasan, dan keselamatan.³⁸

Semua tugas dan tanggung jawab prajurit TNI AL yang dilakukan mengacu pada Trisila TNI AL. Adapun Trisila TNI AL adalah:

Disiplin

1. Memberi penghormatan dengan ikhlas, bangga dan benar berdasarkan peraturan penghormatan.
2. Menggunakan pakaian dinas dengan rapi dan benar sesuai dengan peraturan pakaian dinas seragam

TNI/TNI AL.

3. Mengerjakan perintah dinas dengan penuh rasa tanggung jawab.
4. Membina hubungan atasan dan bawahan dengan serasi dan saling mempercayai.
5. Memegang teguh tujuan dalam melaksanakan tugas.

Hierarki

1. Melaksanakan perintah dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya berdasarkan rantai komando.
2. Menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam rangka efisiensi serta keefektifan.
3. Menunaikan tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
4. Melaksanakan manajemen organisasi secara profesional.
5. Menerapkan keseimbangan, keterpaduan, keadilan dan kejujuran dalam setiap pengambilan keputusan.

Kehormatan Militer

1. Menghindari perbuatan yang memalukan diri sendiri, keluarga, korp dan negara.
2. Menempatkan diri sebagai teladan

³⁸ Heri Darwanto, Operasi Militer Selain Perang, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2013 www.kemhan.go.id. Diakses pada 9 Februari 2020.

bagi lingkungan.

3. Melakukan persaingan secara sehat dalam mengejar karir dengan cara meningkatkan jiwa kejuangan serta profesionalisme.
4. Mempertinggi ketanggapan terhadap dinamika dan perkembangan lingkungan.
5. Mencegah kebijaksanaan yang merugikan TNI AL pada khususnya dan TNI pada umumnya.

Adapun program-program yang dilakukan oleh TNI AL tidaklah melanggar tugas yang telah ditetapkan. Upaya tersebut dilakukan untuk mempersiapkan segala potensi nasional dan merupakan tanggung jawabnya terhadap diri sendiri, tanggung jawabnya terhadap kehidupan sosial dan tanggung jawab kepada Tuhan.

3) **Corporateness**

Salah satu Indikator TNI profesional menurut Samuel P. Huntington adalah *corporateness*. Apabila diartikan secara bahasa *corporateness* adalah kebersamaan atau dapat dimengerti sebagai perasaan mengenai kesatuan organik. Prajurit TNI AL sebagai personel individu yang dibentuk menjadi insan pertahanan dengan memiliki kecakapan dan keterampilan juga dituntut untuk mampu menjalankan tugas secara

kelompok. Hal tersebut merupakan bagian dari sistem pertahanan negara bahwa TNI merupakan bagian dari kesatuan pertahanan negara.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pertahanan anggota TNI berada dalam komando instruksi kelompok, sehingga tugas dan fungsi yang dimiliki sebagai komponen pertahanan dapat terlaksana dengan baik. Organisasi TNI diawaki oleh berbagai keahlian dan spesialisasi, maka berbagai keahlian dan spesialisasi tersebut tidak akan berdaya guna yang maksimal apabila tidak ada kesatuan, keterpaduan dan saling mengisi satu sama lain.

Keahlian dan spesialisasi yang dimiliki oleh personel TNI Angkatan Laut harus bisa dikoordinasikan dengan baik dan sinergis, agar setiap unit-unit kerja dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran dapat saling mengisi dan mengarah pada dukungan pencapaian tugas pokok, visi dan misi TNI Angkatan Laut. Sebagai prajurit TNI Angkatan laut di Koarmada I peningkatan koordinasi/kebersamaan dilaksanakan dengan menginternalisasikan nilai-nilai *Sapta Marga* dan *Sumpah Prajurit* oleh masing-masing personel, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai prajurit TNI Angkatan Laut dalam

organisasi dapat tercapai dan menghindari kendala yang akan terjadi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan telah dijabarkan sebelumnya tentang hasil penelitian mengenai profesionalisme prajurit TNI

Angkatan Laut dalam mendukung pertahanan negara di Komando Armada I, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Keahlian TNI AL di Koarmada I dibentuk melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan. Dengan demikian tingkat keberhasilan dalam pendidikan, pelatihan, dan penugasan dapat menjadi umpan balik yang sangat berguna bagi pengembangan pendidikan. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan akan berpengaruh terhadap keberhasilan pembinaan personel TNI AL secara keseluruhan, mengingat penyelenggaraan pendidikan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembinaan prajurit sebagai proses investasi sumber daya manusia pertahanan. Sehingga upaya pendidikan di lingkungan TNI AL harus senantiasa mengarah kepada terwujudnya keseimbangan antara jiwa juang dengan profesi

keprajuritan.

2. Prajurit TNI AL di Koarmada I merupakan refleksi dari prinsip militer profesional menurut Samuel Huntington. Indikator profesionalisme berupa tanggung Jawab dilaksanakan dalam menjalankan fungsinya TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan yang saat menjalankan tugasnya didasarkan pada kebijakan dan keputusan politik yang ditentukan oleh negara melalui Operasi Militer untuk Perang yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap kehidupan sosial dan tanggung jawab kepada Tuhan. Selain melaksanakan tugas OMP, personel TNI AL juga melaksanakan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam pelaksanaan OMSP terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan, diantaranya adalah: kejelasan sasaran, kesatuan tindak, keabsahan, keuletan, batasan, dan keselamatan *US Headquarters Department of the Army* dalam Darwanto (2013). Adapun program-program yang dilakukan oleh TNI AL tidaklah melanggar tugas yang telah ditetapkan melainkan mengacu pada

Trisila TNI AL. Upaya tersebut dilakukan untuk mempersiapkan segala potensi nasional serta merupakan tanggung jawabnya terhadap diri sendiri, tanggung jawabnya terhadap kehidupan sosial dan tanggung jawabnya kepada Tuhan.

3. *Corporateness* diterapkan guna mengkomodir keahlian prajurit TNI AL sebagai insan individu yang bekerja secara terorganisir, hal tersebut bertujuan agar setiap unit-unit kerja dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran dapat saling mengisi dan mengarah pada dukungan pencapaian tugas pokok, visi dan misi TNI AL. Sebagai prajurit TNI AL di Koarmada I peningkatan koordinasi/kebersamaan dilaksanakan dengan menginternalisasikan nilai-nilai *Sapta Marga* dan *Sumpah Prajurit* oleh masing-masing personel, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai prajurit TNI AL dalam organisasi dapat tercapai dan menghindari kendala yang akan terjadi.

Dari hasil analisis data dan kesimpulan terhadap penelitian analisis

profesionalisme prajurit TNI AL dalam mendukung pertahanan negara di Koarmada I, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Keahlian TNI AL di Koarmada I dibentuk melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan. Pendidikan dalam pembentukan TNI AL profesional diupayakan melalui pembekalan dan pemantapan kemampuan personel yang dapat ditempuh melalui latihan dan penugasan sebagai kelanjutan pendidikan. Untuk itu peneliti memberikan rekomendasi kepada Koarmada I untuk meningkatkan program pendidikan dan pelatihan kepada prajurit TNI AL, serta lebih memperhatikan penugasan prajurit agar penempatan prajurit sesuai dengan kualifikasinya, mengingat TNI AL merupakan investasi sumber daya manusia pertahanan.
2. Tanggung Jawab prajurit TNI AL di Koarmada I dilaksanakan melalui menjalankan fungsi TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan dan melaksanakan tugas pokoknya yaitu Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) mengacu pada Trisila TNI AL yang bertanggung jawab terhadap

diri sendiri, bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Untuk itu peneliti merekomendasikan kepada

3. pemangku kebijakan di Koarmada I untuk meningkatkan strategi penentuan kebijakan, mengingat posisi TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan negara dalam hal ini khususnya TNI AL.
4. *Coorporatness* diterapkan guna mengakomodir keahlian prajurit TNI AL sebagai insan individu yang bekerja secara terorganisir, hal tersebut bertujuan agar setiap unit-unit kerja dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran dapat saling mengisi dan mengarah pada dukungan pencapaian tugas pokok, visi dan misi TNI AL. Sehingga peneliti memberikan rekomendasi kepada Koarmada I untuk menerapkan *well paid, well trained and well educated* guna terwujudnya TNI AL yang profesional dalam mendukung pertahanan negara.

Bangun, Wilson. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.

Badriyah, Mila. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia

Creswell, John W.. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions*. California: Sage Publication.

Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Huntington, Samuel P.. (1957). *The Soldier and the State; the Theory and Politics of Civil- Military Relations*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.

Supriyatno, Makmur. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jurnal:

Haras, Yusrah Muhamad. (2017). "Peran TNI AL dalam Mendukung Terwujudnya Indonesia sebagai

Daftar Pustaka

Buku:

- Poros Maritim Dunia Perspektif Manajemen Pertahanan”. *Jurnal Prodi Manajemen Pertahanan*. Vol. 3, No. 2.
- Ma’arif, Syamsul. (2014). “Prajurit Profesional-Patriot: Menuju TNI Profesional pada Era Reformasi”. *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, Vol. 19, No. 2, pp. 257-286.
- Soegandhi, Vannecia Marchelle, Sutanto, Eddy M., dan Setiawan, Roy. (2013). “Pengaruh Kepuasan Kerja dan Loyalitas Kerja dengan Organizational Citizenship Behavior Pada Karyawan PT. Surya Timur Sakti Jatim”. Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra. *Jurnal Manajemen Bisnis*. AGORA Vol. 1, No. 1.
- Stewart, Richard W. *American Military History vol. I; The United States Army and The Forging A Nation 1775-1791*. United States Army: Washington DC. 2009.
- Wardani, Eka Suryaningsih. (2009). “Pengaruh Kompensasi, Keahlian dan Motivasi Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Muara Tawar”. *Jurnal Manajemen Universitas Gunadarma*. Vol. 41, pp. 1-11.
- Yasa, I.G. Merta. (2013). “Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Profesionalisme Terhadap Kinerja Prajurit TNI AL di Lanal Palembang”. *Jurnal Mahasiswa Magister Manajemen*. *EJME*. Vol. 1, No.3.
- Undang-Undang:**
- Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara.
- Website:**
- Alfredo, David. "Define Military Professionalism" careertrend. Retrieved from <https://careertrend.com/about-5476748-define-military-professionalism.html>, diakses pada 26 September 2019.
- Darwanto, Hery. “Operasi Militer Selain Perang, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia”. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Retrieved from www.kemhan.go.id diakses pada 9 Februari 2020.
- Detiknews. “Ini Dia Spesifikasi KRI ‘Siluman’ Klewang yang Terbakar” detiknews. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d->

2046452/INI-dia-spesifikasi-kri-siluman-klewang-yang-terbakar, diakses pada 19 Juli 2019.

Detiknews. “KRI Memet Sastrawiria Terbakar di Perairan Lampung” detiknews. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-990483/kri-memet-sastrawiria-terbakar-di-perairan-lampung>, diakses pada 19 Juli 2019.

Detiknews. “Pelanggaran Personel TNI AL Mencapai 779 Kasus” detiknews. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-1051031/pelanggaran-personel-tni-al-mencapai-779-kasus>, diakses pada 19 Juli 2019.

Dispenal Mabel. “Alami Kebocoran, KRI Teluk Peleng-535 Kandas di Dermaga” tnial.mil.id. Retrieved from <https://www.tnial.mil.id/News/Seremonial/tabid/79/articleType/ArticleView/articleId/16749/Default.aspx>, diakses pada 19 Juli 2019.

Kompas.com, Editor. “Pelanggaran Prajurit TNI AL Sebagian Besar Asusila dan Narkoba” kompas.com. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2009/02/20/09312044/policy.html>, diakses pada 19 Juli 2019.

Pahlevi. “Pengertian Tanggung Jawab, Manfaat dan Macam-Macam”. Retrieved from <https://www.pahlevi.net/pengertian-tanggung-jawab/>, diakses pada 9 Februari 2020.

Pamungkas, Bayu. “KRI Karimata 960: Setelah Terbakar Hebat, Kini Resmi Pensiun Dari Kolinlamil TNI AL” indomiliter. Retrieved from <https://www.indomiliter.com/kri-karimata-960-setelah-terbakar-hebat-kini-resmi-pensiun-dari-kolinlamil-tni-al/>, diakses pada 19 Juli 2019.

Perdana, Gilang. “Kapal Tanker KRI Arun 903 Kandas Di Dermaga Ujung” indomiliter. Retrieved from <https://www.indomiliter.com/kapal-tanker-kri-arun-903-kandas-di-dermaga-ujung/>, diakses pada 19 Juli 2019.

Santhika, Eka. “KRI Rencong Terbakar dan Tenggelam, Semua Awak Selamat” cnnindonesia. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180911222933-20329454/kri-rencong-terbakar-dan-tenggelam-semua-awak-selamat>, diakses pada 19 Juli 2019.

Savitri, Evi. "Terlibat Penyekapan Warga, Prajurit TNI AL dipecat" detiknews. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-3988454/TERlibat-penyekapan-warga-prajurit-tni-al-dipecat>, diakses pada 19 Juli 2019.

Sitopu, Saryah. "Sling Penahan KRI Teluk Bintuni Putus Sebelum Diresmikan" saibumi.com. Retrieved from <https://www.saibumi.com/artikel-57320-seling-penahan-kri-teluk-bintuni-putus-sebelum-diresmikan.html>, diakses pada 19 Juli 2019.

Utama, Abraham. "KRI Pati Unus Bocor di Perairan Belawan" cnnindonesia. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160531144023-20-134742/kri-pati-unus-bocor-di-perairan-belawan>, diakses pada 19 Juli 2019.